



INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) 2013

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) JAWA TENGAH 2013 SEBESAR 60,84 DARI SKALA 0 SAMPAI 100, ANGKA INI TURUN 2,95 POIN DIBANDINGKAN DENGAN IDI JAWA TENGAH 2012 SEBESAR 63,79.

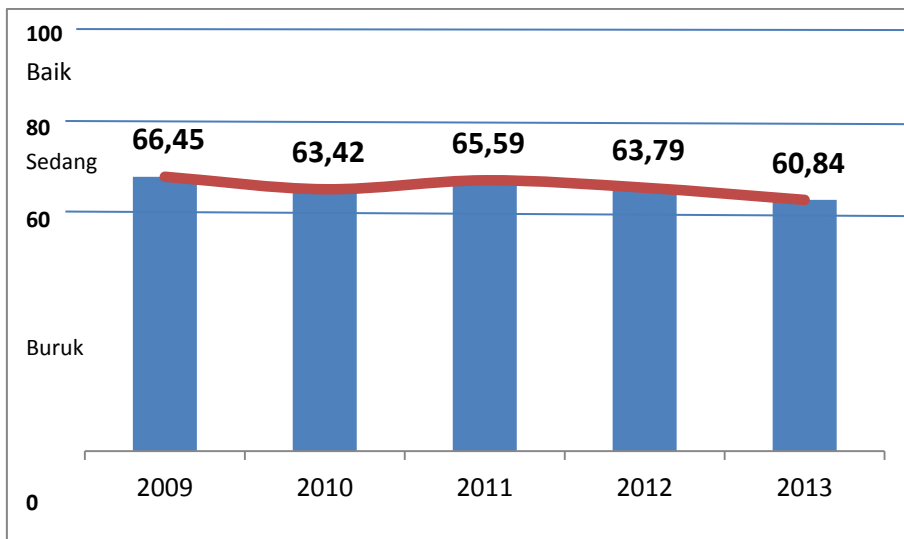
- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah 2013 sebesar 60,84 dari skala 0 sampai 100, angka ini turun 2,95 poin dibandingkan dengan IDI Jawa Tengah 2012 sebesar 63,79. Meskipun mengalami penurunan, tingkat demokrasi Jawa Tengah masih tetap berada pada kategori sedang. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).
- Penurunan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yang diukur yakni Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*) yang naik 4,15 poin dari 77,03 pada 2012 menjadi 79,18 pada 2013, Hak-Hak Politik (*Political Rights*) sebesar 46,29 atau sama dengan 2012 sebesar 46,29 juga, dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*) yang turun 16,57 poin dari 77,46 pada 2012 menjadi 60,89 pada 2013.
- Secara metodologis dalam pengumpulan data digunakan 4 sumber data berupa : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

1. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Tengah 2013

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah 2013 sebesar **60,84** dari skala 0 sampai 100, angka ini turun **2,95** poin dibandingkan dengan IDI Jawa Tengah 2012 sebesar 63,79. Meskipun mengalami penurunan, tingkat demokrasi Jawa Tengah masih tetap berada pada kategori sedang.

Perkembangan IDI Jawa Tengah dari 2009 hingga 2013 mengalami fluktuasi (2009 sebesar 66,45; 2010 sebesar 63,42, 2011 sebesar 65,59, 2012 sebesar 63,79, dan 2013 sebesar 60,84). Meskipun demikian, tingkat demokrasi Jawa Tengah berdasarkan penghitungan indeks sejak tahun 2009 hingga 2013 tetap masih berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. Karena IDI disusun berdasarkan *evidence based* (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi.

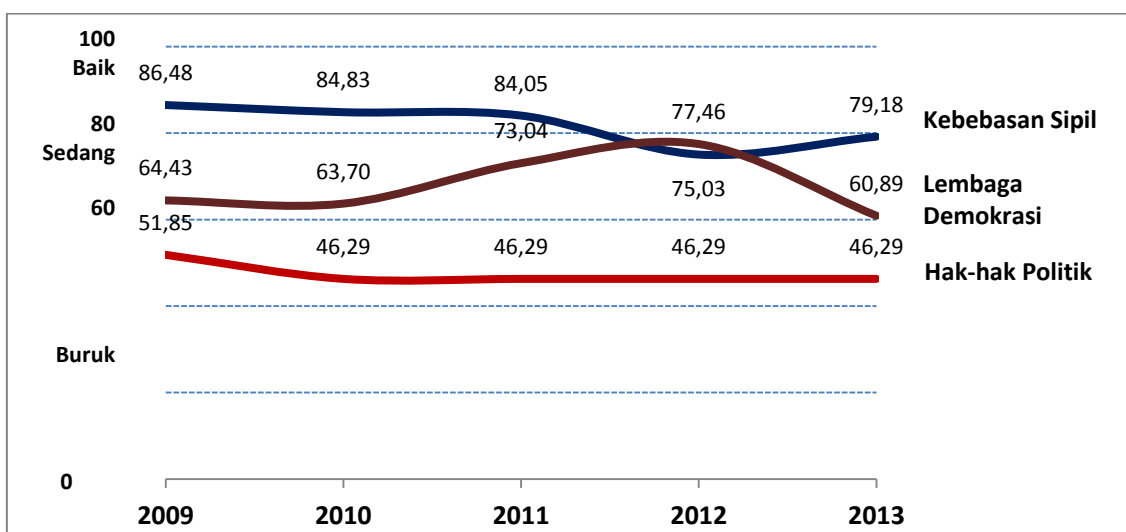
Grafik 1. Perkembangan IDI Jawa Tengah, 2009-2013



Angka IDI Jawa Tengah 2013 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni aspek kebebasan sipil dengan skor sebesar 79,18; aspek hak-hak politik sebesar 46,29; dan aspek lembaga demokrasi sebesar 60,89.

Secara lebih rinci, pada 2013 distribusi indeks dalam ketiga aspek demokrasi yang diukur terlihat aspek kebebasan sipil mengalami peningkatan sebesar 4,15 poin. Sementara nilai indeks hak-hak politik cenderung tidak mengalami perubahan berarti atau relatif sama. Sedangkan nilai indeks lembaga demokrasi mengalami penurunan sebesar 16,57 poin. Walaupun terjadi penurunan indeks, pola sebaran nilai tersebut masih sama dengan tahun pengukuran sebelumnya, yaitu aspek kebebasan sipil secara umum terkategori “sedang” dan aspek lembaga demokrasi “sedang”, sementara aspek hak-hak politik masih “buruk”. Dari data IDI Jawa Tengah 2013 diperoleh informasi pada aspek hak-hak politik masih terdapat kecenderungan penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti merusak, memblokir, dan melakukan penyegelan.

Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Jawa Tengah, 2012-2013



Dari sisi variabel, pada IDI Jawa Tengah 2013 terdapat empat variabel yang mengalami peningkatan skor yakni kebebasan berpendapat (naik 13,89 poin dari 47,20 pada 2012 menjadi 61,09 pada 2013), kebebasan berkeyakinan (naik 5,99 poin dari 75,32 pada 2012 menjadi 81,31 pada 2013), kebebasan dari diskriminasi (naik 13,78 poin dari 82,75 pada 2012 menjadi 96,53 pada 2013), dan peran DPRD (naik 2,31 poin dari 41,01 pada 2012 menjadi 43,32 pada 2013). Sementara itu, terdapat dua variabel yang mengalami penurunan skor diantaranya kebebasan berkumpul dan berserikat yang turun 46,88 poin dari 81,88 pada 2012 menjadi 46,88 pada 2013 dan peran peradilan yang independen yang juga turun 75,00 poin dari 75,00 pada 2012 menjadi 0,00 pada 2013. Kemudian sisanya tidak mengalami perubahan atau relatif sama.

Tabel 1. Perkembangan Skor Variabel IDI Jawa Tengah, 2012-2013

No	Nama Variabel	2012	2013
1	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	81.88	35.00
2	Kebebasan Berpendapat	47.20	61.09
3	Kebebasan Berkeyakinan	75.32	81.31
4	Kebebasan dari Diskriminasi	82.75	96.53
5	Hak Memilih dan Dipilih	42.59	42.59
6	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	50.00	50.00
7	Pemilu yang Bebas dan Adil	94.94	94.94
8	Peran DPRD	41.01	43.32
9	Peran Partai Politik	100.00	100.00
10	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	80.30	80.30
11	Peran Peradilan yang Independen	75.00	0.00

Dari sisi indikator, pada IDI Jawa Tengah 2013 terdapat 11 indikator yang mengalami kinerja baik (merupakan indikator yang memiliki skor di atas 80) diantaranya yaitu indikator 5, 6, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 23, 24, dan 25 (lihat Tabel 2 Perkembangan Skor Indikator, 2012 – 2013). Kendati demikian, masih terdapat masalah kronis yang ditunjukkan melalui indikator 1, 2, 4, 7, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 27 dan 28 (merupakan indikator yang memiliki skor dibawah 60), diantaranya adalah indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat, ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat, ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama, hak memilih atau dipilih terhambat, kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih, kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, alokasi anggaran pendidikan/kesehatan, perda yang merupakan inisiatif DPRD, rekomendasi DPRD kepada eksekutif, keputusan hakim yang kontroversial dan penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi. Oleh karena itu, indikator tersebut memerlukan perhatian khusus agar nilainya dapat membaik.

Tabel 2. Perkembangan Skor Indikator, 2012 – 2013

Nomor	Indikator	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
Kebebasan Sipil			
1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	90.00	40.00
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	25.00	0.00
3	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	56.67	73.33
4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	0.00	0.00
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	100.00	91.30
6	Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	40.00	100.00
7	Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	0.00	30.00
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	100.00	100.00
9	Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst	77.50	87.50
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender	66.67	100.00
Hak-Hak Politik			
11	Hak memilih atau dipilih terhambat	34.62	34.62
12	Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	50.00	50.00
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	30.00	30.00
14	Voters turnout	71.26	71.26
15	% Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi	70.00	70.00
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	0.00	0.00
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100.00	100.00
Lembaga Demokrasi			
18	Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	100.00	100.00
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	89.87	89.87
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	52.10	54.97
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	38.46	41.18
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	3.57	3.57
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	100.00	100.00
24	% perempuan pengurus partai politik	100.00	100.00
25	Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan parpol	90.90	90.90
26	Keterlibatan PNS dalam kegiatan parpol peserta pemilu	69.70	69.70
27	Keputusan hakim yang kontroversial	50.00	0.00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100.00	0.00

2. Catatan Teknis

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia itulah maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama *stakeholder* lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf, Prof Musdah Mulia, Dr. Syarif Hidayat, dan Dr. Abdul Malik Gismar merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi, diantaranya adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Pada dasarnya IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia.

Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui *focus group discussion* (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya.

Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2013

Aspek	Variabel	Indikator
1. Kebebasan Sipil	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2 indikator
	2. Kebebasan Berpendapat	2 indikator
	3. Kebebasan Berkeyakinan	3 indikator
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	3 indikator
2. Hak-Hak Politik	5. Hak Memilih dan Dipilih	5 indikator
	6. Partisipasi Politik dlm Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	2 indikator
3. Lembaga Demokrasi	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator
	8. Peran DPRD	3 indikator
	9. Peran Partai Politik	2 indikator
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator
	11. Peradilan yang Independen	2 indikator

Dari sisi penghitungan Indeks, IDI harus melalui tiga tahapan proses yakni *pertama*, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; *kedua*, menghitung indeks provinsi; dan *ketiga*, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional.

Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoretik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).